

Analisis Pengaruh Jumlah Industri Besar Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Meurah Intan¹, Yoyon Safrianto²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received : 11 Maret 2022
Revised : 15 Juli 2022
Accepted : 28 Juli 2022

KEYWORDS

Economic Growth, Provincial Minimum Wage, The Number of Industry

CORRESPONDENCE

E-mail: yoyonsafrianto84@gmail.com

A B S T R A C T

The number of large industries actually really helped of public and governments in terms of revenue or income where by the presence of large industries so minimum wage workers can be set in accordance with the need. Wages is a concrete manifestation of a form of an exchange that occurs between users of services and providers, minimum wages to into a minimum standards used by the entrepreneurs or to the offender industry for provides wages to workers in effort or it works. This research used a regression spss version 17. Based on the results of research conducted, so it can be concluded is as follows: linear regression equation the results and the worship of idols can be seen that the value of X_1 (the number of large industries) as much as $-0,055X_1$ meaning that the number of large industries aceh province are reduced as much as 1 unit and would cause a decrease of percent 0,055. T account value on the variable of X_1 (big industries) greater than the ttable ($2,302 > 1,796$), significance to the level of errors $\alpha = 0,050$ ($0,042 < 0,050$), which means that the number of big industries a factor that can promote economic growth significantly. Based on the result of multiple linear regression can be seen that the UMP of $-3,839$ means when down by the UMP 1 will cause a decrease in economic growth at $-3,839$ percent. UMP less than of the ttable ($1,107 < 1,796$), it significance to the level of errors $\alpha = 0,050$ ($0,292 > 0,050$), this means the ump was the factor that cannot increase economic growth significantly.

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh adalah provinsi paling barat Indonesia yang merupakan salah satu pintu gerbang utama di wilayah Sumatera, maka pastilah banyak industri-industri yang mulai bermuculan di Provinsi Aceh terutama industri-industri besar yang siap memproduksi untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar dari seluruh Aceh dan luar daerah (BPS Aceh, 2019).

Dari tabel 1 menjelaskan bahwa pertumbuhan jumlah industri besar di Provinsi Aceh pada tahun 2009 berjumlah 92 unit. Pertumbuhan jumlah industry di Provinsi Aceh mengalami penurunan dari tahun 2010 jumlah industri besar 75 unit sampai dengan tahun 2018 menjadi 50 unit dan kembali meningkat ditahun 2019 yaitu 55 unit. Pertumbuhan jumlah industry besar di Provinsi Aceh tidak mengalami peningkatan yang besar. Penurunan tersebut di sebabkan oleh tiga factor sebagaimana yang disampaikan oleh Bank Indonesia perwakilan Aceh, bahwa ada tiga sektor penurunan kinerja ekonomi Aceh pada triwulan pertama tahun 2018, yakni penurunan di sektor penggalian dan pertambangan, penurunan kinerja industri pengolahan serta realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) yang mengalami keterlambatan pengesahan. Penurunan di sector penggalian dan Pertambangan khususnya berasal dari subsector non-migas, yakni dikomoditas galian C (pasir dan pasir besi). Penurunan pada komoditas tersebut seiring dengan adanya larangan dan penertiban

penggalian akan komoditas tersebut oleh pemerintah provinsi Aceh. Penurunan kinerja industri pengolahan disebabkan oleh adanya penurunan di industri kimia. Salah satu yang terbesar PT. PIM yang produksinya secara tahunan turun drastis hingga mencapai dua digit.

Tabel. 1 Jumlah Industri Besar di Provinsi Aceh Tahun 2006-2019

No	Tahun	Unit
1	2006	86
2	2007	90
3	2008	90
4	2009	92
5	2010	75
6	2011	49
7	2012	48
8	2013	43
9	2014	43
10	2015	44
11	2016	44
12	2017	52
13	2018	50
14	2019	55

Sumber :BPS, data diolah (2019)

Nama-nama bidang industri besar yang tersebar di setiap Kabupaten:

Tabel. 2. Jumlah dan Nama Bidang Industri Besar di Provinsi Aceh Tahun 2019

No	Industri	Jumlah Industri
1	Makanan	38
2	Minuman	3
3	Kulit, barang dari kayu dan alas kaki	4
4	Percetakan dan reproduksi media rekamam	2
5	Bahan Kimia dan barang dari bahan kimia	3
6	Barang Galian Bukan Logam	2
Jumlah		52

Sumber : BPS, data diolah (2019)

Berdasarkan tabel 2 jumlah industri di Provinsi Aceh sebanyak 52 unit industri yang mana jumlah industri terbanyak adalah padabidang industry makanan dengan jumlah 38 unit. Industri-industri tersebut berada dibeberapa Kabupaten di Aceh yaitu sebagai berikut:

Tabel.3. Kabupaten yang Terdapat Industri Besar di Provinsi Aceh Tahun 2006-2019

No	Kabupaten	Jumlah Industri
1	AcehSingkil	4
2	AcehBarat	2
3	AcehBesar	4
4	Bireun	3
5	AcehUtara	4
6	GayoLues	1
7	AcehTamiang	9
8	NaganRaya	7
9	Langsa	5
10	Lhokseumawe	3
11	Subulussalam	3
12	PidieJaya	3
13	BandaAceh	2
13	Sabang	2
Jumlah		52

Sumber : BPS, data diolah (2019)

Jumlah industri besar sebenarnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah dalam hal pemasukan atau pendapatan dimana dengan adanya industri besar maka upah minimum dapat ditetapkan sesuai kebutuhan pekerja. Penetapan upah minimum berdasarkan pada standar biaya hidup. Pemerintah menetapkan Upah Minimum Provinsi berdasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Selain menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga digunakan dalam penetapan nilai UMP. Berikut adalah data upah minimum di Provinsi Aceh adalah:

Tabel. 4 UMP Provinsi Aceh 2006-2019

No	Tahun	UMP(Rp)
1	2006	1.100.000
2	2007	1.200.000
3	2008	1.250.000
4	2009	1.300.000
5	2010	1.350.000
6	2011	1.380.000
7	2012	1.400.000
8	2013	1.550.000
9	2014	1.750.000
10	2015	1.900.000
11	2016	2.118.500
12	2017	2.500.000
13	2018	2.717.750
14	2019	2.916.810

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan ProvinsiAceh (2019)

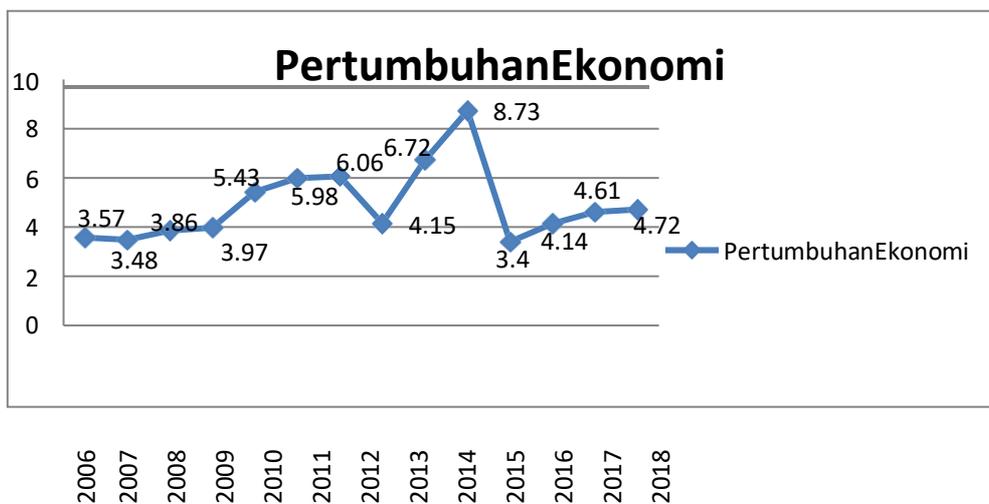
Dari data UMP di atas bahwa dari tahun 2009-2019 terlihat bahwa upah minimum di Provinsi Aceh

mengalami peningkatan dalam setiap tahun. Maka dapat diketahui bahwa dengan naiknya besaran standar upah, diharapkan bagi industry dapat memberikan upah yang layak sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Tabel. 5 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2006-2019

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2006	3,57
2	2007	3,48
3	2008	3,86
4	2009	3,97
5	2010	5,43
6	2011	5,98
7	2012	6,06
8	2013	4,15
9	2014	6,72
10	2015	8,73
11	2016	3,40
12	2017	4,14
13	2018	4,61
14	2019	4,72

Sumber : BPS, data diolah (2019)



Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh dari Tahun 2006-2019

Dari tabel dan grafik diatas bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh mengalami naik dan turun atau fluktuatif. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,97 persen. Perkembangan ekonomi terus meningkat dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini sebagai akibat dari semakin meningkatnya jumlah investasi di Aceh yang mengakibatkan banyaknya pembangunan proyek-proyek yang berpengaruh pada peningkatan jumlah produksi barang dan jasa yang ada di Aceh yang kemudian berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Namun pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi kembali menurun yaitu 3,40 persen. Dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi ini maka pada tahun 2016 pembangunan ekonomi juga tidak berkembang.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2008) Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Menurut Mankiw (2007) penelitian yang berkaitan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja yaitu teori fungsi produksi *Cobb Douglas* yang menjelaskan adanya pembagian pendapatan nasional antara modal dan tenaga kerja tetap konstan selama periode yang jangka panjang. Menurut Sukirno (2010) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Dalam penggunaan yang lebih umum istilah pertumbuhan ekonomi dinegara-negara maju, sedangkan pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan dinegara sedang berkembang (Arsyad, 2010). Jhingan (2012) proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara tergantung pada sumber alamnya, sumber daya manusia, modal, usaha, teknologi, dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi apabila pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan bagi penduduk suatu negara (Silalahi dkk, 2013).

Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Pemikiran klasik, dalam teori ini dimana luas tanah dan kekayaan alam lainnya tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan (Surkirno, 2015). Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut (Surkirno, 2015).
2. Teori Schumpeter, teori ini menunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Berbagi kegiatan inovasi ini akan memerlukan investasi baru (Surkirno, 2015).
3. Teori H-O, bahwa sarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady growth* dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan permisalan berikut: (i) barang modal telah mencapai kapasitas penuh, (ii) tabungan adalah proposional dengan pendapatan nasional, (iii) rasio modal-modal produksi (*capital-output ratio*) tetap nilainya, dan (iv) perekonomian terdiri dari dua sektor, (Surkirno, 2015).
4. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Faktor yang paling penting yaitu modernisasi teknologi dan pertumbuhan kemahiran dan kepekaan tenaga kerja” (Surkirno, 2015).

Model perhitungan pertumbuhan ekonomi wilayah dalam suatu periode, yaitu (Tambunan, 2012):

$$Gt = \frac{PDRBt - PDRBt - 1}{PDRBt - 1} \times 100\%$$

Industri

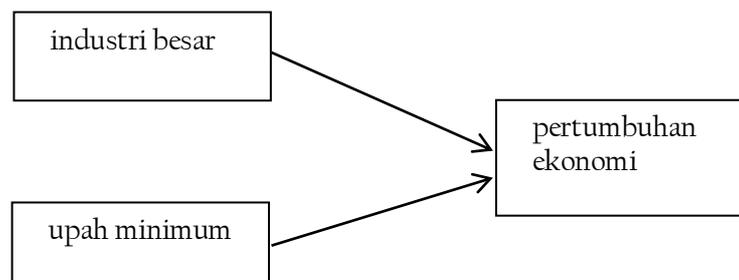
Industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi produksi perdagangan antar negara yang pada akhirnya sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, mendorong perubahan struktur ekonomi di banyak negara, dari yang tadinya (Tambunan, 2003). Winarno dan Ismaya (2010) industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan-bahan atau barang dengan menggunakan sarana atau peralatan, seperti mesin untuk menghasilkan barang

jadi dan jasa.

Menurut Ismanthono (2006) industri adalah usaha produktif, terutama dalam bidang produksi atau perusahaan tertentu yang menyelenggarakan jasa-jasa seperti transportasi dan berhubungan yang menggunakan modal dan tenaga kerja relative besar. Menurut Sukirno (2011) pengertian industri gabungan sebuah firma yang menjalankan kegiatan yang menghasilkan suatu jenis barang tertentu. Semua firma tersebut merupakan keseluruhanpenjual dalam pasar suatu barang.

Upah Minimum

Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah tetapi juga lembur dan tunjangan-tunjangan yang diterima secara rutin/regular (tunjangan transport, uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin (Badan Pusat Statistik 2011, h. 11). Menurut peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2017, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah bulananterendah tersebut dengan waktu kerja 7 jam perhari atau 40 jam perminggu bagi system kerja 5 hari perminggu, yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih dirundingkan secara Bipartit antara pekerja/buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh degan pengusaha diperusahaan yang bersangkutan.



Kerangka pemikiran merupakan suatu model konsep dari suatu teori atau pemikiran yang terangkai dalam tinjauan pustaka. Pada dasarnya kerangka pemikiran merupakan tuangan teoritis dari tinjauan pustaka yang akan dibahas di dalam penelitian. Kerangka pemikiran dapat berupa bagan, deskriptif kualitatif, atau bahkan gabungan keduanya. Kerangka pemikiran dalam susuna penelitian akan menghasilkan suatu kerangka berpikir yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Jumlah Industri Besar di Provinsi Aceh

Untuk melihat perkembangan jumlah Industri Besar di Provinsi Aceh periode2006 hingga 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Jumlah Industri Besar Di Provinsi Aceh Tahun 2006-2019

No	Tahun	Unit
1	2006	86
2	2007	90
3	2008	90
4	2009	92
5	2010	75
6	2011	49
7	2012	48
8	2013	43
9	2014	43
10	2015	44
11	2016	44
12	2017	52
13	2018	50
14	2019	55

Sumber: BPS, data diolah (2019)

Jumlah industri pada tahun 2009 yaitu sebanyak 92 industri besar, selanjutnya pada tahun 2007 dan 2008 dimana masing-masing sebanyak 90 industri besar, pada tahun 2006 sebanyak 86 industri besar. Sedangkan pada tahun lainnya industri besar mengalami penurunan

Jumlah UMP di Provinsi Aceh

Upah Minimum Provinsi periode 2006 hingga 2019 terdapat pada tabel berikut:

Tabel 7. UMP Provinsi Aceh Pada Tahun 2006-2019

No	Tahun	UMP (Rp)
1	2006	1.100.000
2	2007	1.200.000
3	2008	1.250.000
4	2009	1.300.000
5	2010	1.350.000
6	2011	1.380.000
7	2012	1.400.000
8	2013	1.550.000
9	2014	1.750.000
10	2015	1.900.000
11	2016	2.118.500
12	2017	2.500.000
13	2018	2.717.750
14	2019	2.916.810

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kepedudukan Provinsi Aceh, 2019

Penyebab kenaikan UMP mengikuti besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dasar penentuan upah adalah kebutuhan hidup layak dengan melihat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian

naik turunnya inflasi dan KHL dapat meningkatkan dan menurunkan UMP.

Perkembangan Ekonomi di Provinsi Aceh

Pertumbuhan ekonomi Provinsi di Provinsi Aceh periode 2006 hingga 2019:

Tabel 8. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh Tahun 2006-2019

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2006	3,57
2	2007	3,48
3	2008	3,86
4	2009	3,97
5	2010	5,43
6	2011	5,98
7	2012	6,06
8	2013	4,15
9	2014	6,72
10	2015	8,73
11	2016	3,40
12	2017	4,14

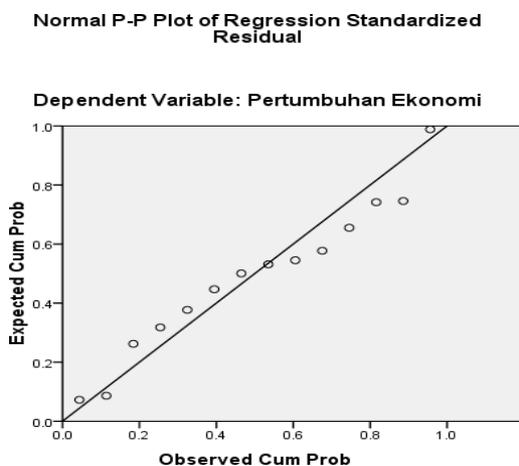
Sumber : BPS, data diolah (2019)

Pada tahun 2015 jumlah pertumbuhan ekonomi tinggi seiring dengan sumber daya manusia di tahun tersebut meningkat dimana banyaknya masyarakat yang sudah bekerja, SDM yang mendukung dimana banyaknya sumber daya alam di Aceh yang dapat dihasilkan seperti batu bara, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang dan Aceh mulai melakukan menerima perkembangan teknologi tersebut , budaya yang terus berbaur di Aceh dari berbagai daerah, dan sumber daya modal yang didapatkan Aceh dari para investor luar.

Analisis Data

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan garis diagonal.

Grafik 2
Uji Normalitas



Uji multikolinieritas dengan SPSS versi 17:

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)	32.211	
Jumlah Industri	.598	1.673
UMP	.598	1.673

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

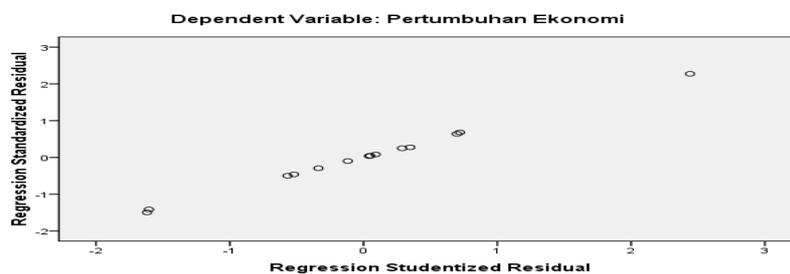
Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 maka diindikasikan model tersebut memiliki gejala Multikolinieritas. Penyimpangan autokorelasi dalam penelitian di uji dengan pengujian Durbin-Watson (DW-test).

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.578 ^a	.334	.212	1.34829	2.318

Hasil uji Durbin-Watson menunjukkan besaran nilai d sebesar 2,318. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson (k, n), yang mana k menunjukkan jumlah variabel independen dan n adalah jumlah sampel. Nilai tabulasi Durbin-Watson bahwa nilai dL = 0,610 dan nilai dU = 1,400 sehingga dapat ditentukan

Scatterplot



kriteria terjadi atau tidaknya autokorelasi. Nilai DW hitung sebesar 1,400 lebih besar dari 1,455 dan lebih besar 2,318 ($dU < d < 4 - dU$).

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas yaitu jumlah industri (X1) dan Lgl0UMP (X2) dengan variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi (Y).

Koefesien

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	32.211	22.543	
Jumlah Industri	-.055	.024	-.733
Lgl0UMP	-3.839	3.467	-.352

Hasil analisis dengan menggunakan program SPSS17, maka di peroleh hasil:

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.578 ^a	.334	.212	1.34829	2.318

Nilai R square sebesar sebesar 0,578, yang artinya koefisien determinasi yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa variabel X1 (jumlah industri besar), dan X2 (UMP), memberikan rasio terhadap variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 57,8%.

Model	T hitung	t tabel	Sig.	α
Jumlah Industri Besar	2,302	1,796	0,042	0,050
Lgl0UMP	1,107	1,796	0,245	0,050

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Secara parsial variabel yang diteliti memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu variabel X1 (jumlah industri besar), nilai t_{hitung} pada variabel X1 (jumlah industri besar) nilainya besar dari t_{tabel} ($2,302 > 1,796$), signifikansi pada tingkat kesalahan $\alpha = 0,050$ ($0,042 < 0,050$), hal ini berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel jumlah industri besar, atau dengan kata lain variabel jumlah industri besar merupakan faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nyata. Selanjutnya hasil nilai t_{hitung} pada variabel variabel X2 (UMP), lebih kecil dibandingkan dari nilai t tabel ($1,107 < 1,796$), signifikansi pada tingkat kesalahan $\alpha = 0,050$ ($0,245 > 0,050$), hal ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel UMP, atau dengan kata lain variabel UMP merupakan faktor yang tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nyata.

ANOVA^b

F hitung	F tabel
2,754	4,844

a. Predictors: (Constant), Jumlah industri besar dan Lgl0UMP

b. Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi

Dari table anova diatas bahwa variabel yang diteliti tidak berpola linier terhadap perkembangan ekonomi Provinsi Aceh. Hasil uji F diketahui nilai Fhitung sebesar 2,754 (db residual = 11). Karena nilai Fhitung lebih besar dari pada Ftabel (4,844) ini menunjukkan bahwa secara simlutan faktor X1 (jumlah industri besar), dan X2 (UMP) tidak mempengaruhi Y (pertumbuhan ekonomi). Dari perhitungan, dapat dilihat nilai Fhitung (2,754) lebih besar dari nilai Ftabel (4,844). Maka dapat disimpulkan variabel yang diteliti tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Pembahasan

Pengaruh Jumlah Industri Besar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Berdasarkan persamaan hasil regresi linear berganda dapat dilihat bahwa nilai X1 (jumlah

industri besar) sebesar $-0,055$ persen. nilai thitung pada variabel X_1 (jumlah industri besar) melebihi dari nilai t tabel ($2,302 > 1,796$), signifikansi pada tingkat kesalahan $\alpha = 0,050$ ($0,042 < 0,050$) yang menunjukkan perkembangan ekonomi yang diakibatkan dari perubahan besaran industri besar, atau variabel jumlah industri besar merupakan faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nyata. Ketika terjadi peningkatan pada jumlah industri besar tingkat nilai pertumbuhan ekonomi juga akan di tingkatkan. Peningkatan output ini merupakan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, sehingga bisa menunjukkan kinerja para pekerja.

Pengaruh UMP Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh

Berdasarkan persamaan hasil regresi linear berganda dapat dilihat bahwa nilai X_2 (UMP) sebesar $-3,839$ artinya apabila UMP menurun sebanyak 1 rupiah maka akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar $-3,839$ persen, lebih kecil dibandingkan dari nilai t tabel ($1,107 < 1,796$), signifikansi pada tingkat kesalahan $\alpha = 0,050$ ($0,292 > 0,050$), menunjukkan H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel UMP, atau dengan kata lain variabel UMP merupakan faktor yang tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nyata. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara individu variabel UMP tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Artinya, tinggi dan rendahnya UMP tidak memiliki pengaruh terhadap penetapan pertumbuhan ekonomi Provinsi. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak menggunakan UMP sebagai standar pertumbuhan ekonomi Provinsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Secara parsial bahwa variabel jumlah industri besar merupakan faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nyata
2. Secara parsial bahwa variabel UMP merupakan faktor yang tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomisecara nyata

Saran

1. Bagi Pemerintah diharapkan agar dapat lebih memperhatikan jumlah industri di provinsi Aceh dengan terus meningkatkan lapangan kerja, hal ini dapat dilakukan dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya serta menggalakkan program kewirausahaan untuk menciptakan lapangan usaha yang mandiri
2. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan memperpanjang periode penelitian dan menggunakan variabel makro ekonomi yang lebih banyak agar mampu memperoleh hasil yang lebih mendekati dengan kondisi sebenarnya.

REFERENSI

- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima. STIM YKPN: Yogyakarta
- Ismantono, Henricus W. (2006). *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Buku Kompas Jakarta
- Mankiw, N. Gregory. (2007). *Makro Ekonomi*, Edisi Ke Enam. Erlangga. Jakarta.
- Mega. 2018. analisis nilai tambah industri terhadap pertumbuhan ekonomi (pdrb) di provinsi sulawesi tenggara. 7(1):55 DOI: 10.32833/majem.v7i1.61
- Nachrowi, Djalal dan Usman, Hardius. (2008). *Penggunaan Teknik Ekonometrika*. Edisi Revisi. Rajawali Pers. Jakarta
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor. 67 Tahun 2017 tentang Upah Minimum. Provinsi _____
- _____. Menteri Nomor.1 tahun 1999 pasal 1 ayat 1 tentang upah minimum.

_____ Pemerintah Nomor. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi mengganti UMR menjadi UMP dan UMK untuk kabupaten / kota.
Rahimat, Mustar. (2008). *Get Success UN Geografi*. PT. Grafindo Media Pratama. Sinulingga, Yogyakarta
Muhammad. (2010). *Ekonomi Industri*. PT. raja Grafindo Persada. Jakarta